

## REVOLUSI MENTAL DALAM PENDIDIKAN UNTUK MEREVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN MENUMBUHKEMBANGKAN WAWASAN KEBANGSAAN

**Enco Mulyasa**

Universitas Islam Nusantara, Bandung

e-mail: mulyasa2000@gmail.com

**Abstract:** *The era of globalization is full of challenges and problems that develop more complex. It requires a mental revolution in various areas of life, including education. A mental revolution in education needs to be done to foster Pancasila values and national insights according to presidential instructions and regulations. Implementation of mental revolution in education, need to be supported by qualified human resources, especially teachers. Teachers have a very strategic role in the mental revolution and are very influential on the quality of education, so that, it needs the terms of personality and adequate ability with various capacities as professional.*

**Keywords:** *Mental Revolution, Education, Pancasila Values, National Insights.*

---

◆

### PENDAHULUAN

Era globalisasi merupakan era kesejagatan yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlangsung begitu pesat, dan tingginya mobilitas manusia karena jarak ruang dan waktu menjadi sangat relatif. Berbagai tantangan dan permasalahan yang datang silih berganti dalam era globalisasi tidak mungkin dihindari, karena meskipun kita menutup pintu, pengaruh globalisasi akan masuk lewat jendela atau merasuk melalui berbagai cara. Bangsa Indonesia harus masuk dalam arus perubahan tersebut, dan ikut bermain dalam era globalisasi; bahkan harus mampu mengambil peluang agar dapat memanfaatkannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Merespon berbagai kondisi di atas, diperlukan revolusi mental dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Revolusi mental dalam pendidikan diperlukan karena tantangan abad 21 dan menyiapkan generasi emas 2045, yang menandai 100 tahun hari ulang tahun kemerdekaan republik Indonesia adalah membangun manusia produktif, kreatif, inovatif, berkarakter dan berkeahlian sesuai minat dan kemampuan individu. Dalam pada itu, revolusi mental dalam pendidikan diperlukan terutama untuk merevitalisasi nilai-nilai pancasila dalam menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan.

### KONSEP DASAR

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional revolusi Mental (GNRM), bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa. Tujuan tersebut mengacu pada nilai-

nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ketiga nilai utama tersebut ditujukan untuk mencapai budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Implementasi gerakan revolusi mental tersebut perlu dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, revolusi mental merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa peserta didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik (White, John, 1990; Armstrong, Thomas, 2009). Hal ini penting, karena setiap manusia lahir tanpa membawa apa-apa hanya membawa potensi yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Potensi bawaan tersebut bisa bersifat positif, dan bisa bersifat negatif. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi positif seoptimal mungkin, dan mengekang atau menghambat berkembangnya potensi negatif.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), revolusi mental dalam pendidikan perlu dilakukan untuk merevitalisasi nilai-nilai Panca Sila dan menyiapkan lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan dalam memasuki era globalisasi. Untuk itu, revolusi mental dalam pendidikan harus merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*), sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan (*continuous quality improvement*), yang ditujukan pada terwujudnya sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.

## REVOLUSI MENTAL DAN NILAI-NILAI PANCASILA

Revolusi mental dalam pendidikan harus menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan seluruh karakter bangsa secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*). Hal tersebut sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab."

Bagaimana implementasi revolusi mental tersebut dalam pendidikan? Secara tegas Presiden telah mengeluarkan Peraturan (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan karakter (PPK). PPK tersebut dilakukan melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Hal tersebut, dapat dilakukan dalam berbagai praktek pendidikan misalnya: anjuran atau suruhan terhadap anak-anak untuk duduk yang baik, tidak berteriak-teriak agar tidak mengganggu orang lain, bersih badan, rapih pakaian, hormat terhadap orang tua, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, menolong teman, dan seterusnya merupakan nilai-nilai Pancasila yang perlu direvitalisasi kembali dalam pendidikan.

## SDM BERKUALITAS DAN BERWAWASAN KEBANGSAAN

*Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *The United Nations Development Program* (UNDP) tahun 2014 melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat 108, artinya untuk kawasan ASEAN saja masih kalah dibanding Singapura (peringkat 9), Brunei Darussalam (peringkat 30), Malaysia (peringkat 62), dan Thailand (peringkat 82). Indonesia sedikit lebih baik dari Filipina yang berada diperingkat 117. HDI ini merupakan sebuah gambaran tentang upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam laporan ini juga dicantumkan rata-rata usia harapan hidup rakyat Indonesia berada di angka 70,8 tahun, cukup tinggi, meski masih kalah tinggi jika dibandingkan dengan Thailand (74,4 tahun), Malaysia

(75 tahun), Brunei Darussalam (78,5 tahun) maupun Singapura (82,3 tahun). Data tersebut menunjukkan masih perlunya investasi jangka panjang untuk meningkatkan angka HDI Indonesia. Lebih lanjut, UNDP melaporkan bahwa: "*In 2011, Human Development Index (HDI) of Indonesia decreased from 108 in 2010 among 169 countries to 124 in 2012 among 187 countries.*" Dikemukakan pula, bahwa: "*Indonesia again ranks lower than five of its ASEAN counterparts, with Singapore leading in 26th place, followed by Brunei (33rd), Malaysia (61st), Thailand (103rd) and the Philippines (112nd).*". Rendahnya peringkat daya saing Indonesia di pasar global juga dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kreativitas dan produktivitas sektor industri dan perdagangan, sesuai dengan tuntutan kehidupan abad 21.

Di dalam negeri sendiri, kita juga masih dihadapkan pada berbagai permasalahan internal, baik berkaitan dengan bencana alam, seperti banjir, longsor, puting beliung, dan lain-lain yang telah memporakporandakan alam kehidupan manusia; maupun yang berkaitan dengan bencana iman, seperti narkoba, pelecehan seksual, premanisme, begal, percaloan di bandara, KKN yang masih marak dimana-mana, menurunnya wawasan kebangsaan sampai pada perseteruan antara dua lembaga hukum (POLRI dan KPK). Polri dan KPK yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, dihadapkan pada arogansi jabatan yang telah mendorong manusia lupa akan hak dan kewajibannya, bahkan boleh jadi lupa akan kekuasaan Allah SWT, ketika manusia mengaku bahwa segalanya bisa direkayasa, *naudubullahiminzalik*. Lengkap sudah permasalahan bangsa ini; belum lagi masalah etnis dan agama yang dipolitisir untuk kepentingan politik. Mudah-mudahan semua cepat berlalu, agar kita bisa segera bangkit dari ketertinggalan dan keterpurukan, sehingga bisa membangun bangsa yang bermartabat, serta membangun rakyat dan masyarakat yang berdaulat.

Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan di atas, kita memerlukan SDM Berkualitas dan berwawasan kebangsaan, agar dapat merevitalisasi nilai-nilai Panca Sila, melalui pendidikan yang berkualitas, yang dipandu oleh guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas pula. Sumber daya manusia berkualitas dan berwawasan kebangsaan merupakan modal dasar untuk mengolah sumber daya alam secara optimal, yang dapat didayagunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, sehingga dapat mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik.

## REVOLUSI MENTAL DALAM PENDIDIKAN DAN REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

Revolusi mental harus merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*), sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan (*continuous quality improvement*), yang ditujukan pada terwujudnya sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Revolusi mental dalam pendidikan harus menumbuhkembangkan nilai-nilai Panca Sila dan mengamalkan seluruh karakter bangsa secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*). Dalam konteks Negara Kesatuan Republik (NKRI); Revolusi mental harus mengandung perekat bangsa yang memiliki beragam budaya dalam wujud kesadaran, pemahaman, dan kecerdasan kultural masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, perlu direvitalisasi kembali sistem nilai yang mengandung makna karakter bangsa yang berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan filsafat Pancasila. Sistem nilai tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa, permusyawaratan, dan keadilan. Beberapa tahun yang lalu sistem nilai tersebut sering ditanamkan dalam bentuk penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4) yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, ketika masyarakat dan bangsa dilanda krisis moral, sistem nilai tersebut perlu direvitalisasi kembali, terutama dalam mewujudkan karakter pribadi dan karakter bangsa yang telah ada seperti tekun beribadah, jujur dalam ucapan dan tindakan, berpikir positif, dan rela berkorban.

Semua itu merupakan karakter luhur bangsa Indonesia yang sekarang sudah hampir punah. Oleh karena itu, merupakan langkah yang positif ketika pemerintah merevitalisasi pendidikan karakter dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan. Melalui pendidikan karakter ini, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, dan masyarakatnya memiliki nilai tambah (*added value*), dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain dan bangsa lain di dunia, sehingga kita bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan global.

Revolusi mental dalam pendidikan diperlukan, karena dunia pendidikan Indonesia sekarang sedang ditantang untuk menjawab berbagai perubahan global yang terjadi begitu cepat, seperti perdagangan bebas (*free trade*), tenaga kerja bebas (*free labour*), perkembangan masyarakat informasi, serta perkembangan budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, terutama akselerasi transformasi dan teknologi informasi yang sangat dahsyat. Pada saat

ini misalnya, kita harus mempersiapkan masyarakat dan bangsa dalam memasuki *Asean Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam pada itu, kita dihadapkan pada fenomena yang sangat dramatis, yakni rendahnya peringkat daya saing, sebagai indikator bahwa pendidikan nasional belum mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, seperti dilaporkan oleh *The World Competitiveness Yearbook* yang diterbitkan oleh *International Institute for Management Development*.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Baswedan dalam Mulyasa (2015) di hadapan kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan Indonesia sedang dalam gawat darurat, dengan berbagai indikator sebagai berikut.

1. Sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan.
2. Nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5; padahal, nilai standar kompetensi guru adalah 75.
3. Menurut *The Learning Curve* kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke 40 dari 40 negara.
4. Pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia berada pada peringkat ke 49, dari 50 negara yang diteliti.
5. Pendidikan Indonesia masuk pada peringkat ke 64, dari 65 negara yang dikeluarkan oleh lembaga *Programme for International Study Assessment (PISA)*, pada tahun 2012. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, tren kinerja pendidikan Indonesia pada pemetaan PISA pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012, cenderung stagnan.
6. Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suap menyuap dan pungutan liar. Mendikbud juga mengatakan bahwa dalam dua bulan terakhir, Oktober hingga November 2014, angka kekerasan yang melibatkan peserta didik di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai 230 kasus. Kejahatan terorganisir juga menjadi masalah dalam pendidikan di Indonesia, bahkan Indonesia berada di peringkat 109 dunia.

Apa yang diungkapkan Mendikbud Anies Baswedan di atas, menunjukkan perlunya revolusi mental dalam pendidikan, terutama untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Revolusi mental diperlukan, karena kehidupan masyarakat abad 21 didominasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (*knowledge and*

*technology-based society*). Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, sebagian besar didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagian lainnya dipengaruhi oleh agama, seni dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Kondisi demikian telah mendorong masyarakat bukan hanya pada kekuasaan tetapi pada profesionalitas, yang pembangunannya harus didasarkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, perkembangan masyarakat ditentukan oleh tingkat profesionalitas para pemimpinnya, sehingga dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan menuntut para pemimpin yang profesional, kompeten, dan bertanggungjawab. Meskipun demikian, pengaruh kehidupan dan kepemimpinan era sebelumnya masih akan mewarnai kehidupan masyarakat, seperti kepemimpinan yang berbasis kekuasaan politik dan ekonomi.

Oleh karena itu, dalam berbagai bidang kehidupan seharusnya dipimpin oleh para profesional, yang menguasai dan ahli dalam bidangnya; bidang ekonomi dipimpin para ekonom profesional, bidang teknologi dipimpin oleh para teknolog profesional, bidang hukum dipimpin oleh para profesional hukum, dan bidang pendidikan dipimpin para profesional pendidikan; bukan sebaliknya. Jika yang terjadi sebaliknya, misalnya bidang ekonomi dikendalikan oleh para ahli pendidikan; atau bidang pendidikan dikendalikan para ekonom; maka tinggal tunggu kehancuran saja, bahkan sebagian besar sudah terjadi dan dapat kita amati dalam tatanan kehidupan masyarakat sekarang ini. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan revolusi mental, agar terjadi koordinasi antar berbagai profesi, dan sinergi antar berbagai profesional, sehingga terwujud kerjasama antar-profesional yang menguasai bidangnya, serta terbentuk *timwork* yang kreatif, efektif, produktif, kompak dan transparan.

Dalam bidang pendidikan, upaya ke arah profesionalitas tersebut telah lama dilakukan, antara lain dengan standarisasi dan sertifikasi yang berbasis pada linearitas keilmuan. Upaya ini dilakukan agar ada kesesuaian antara pendidikan dengan dunia kerja dan dunia industri, yang berujung pada profesionalitas, sehingga setiap orang bisa bekerja secara profesional, aman, dan nyaman, sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.

Proses pendidikan seharusnya tidak lagi seperti yang terjadi di abad 20, yang hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan politik para penguasa (*totaliter*), memenuhi kehendak para industrialis

(*robotik*), bahkan hanya memenuhi kehendak para penjajah yang hanya melahirkan mental kuli (*kolonialistik*). Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pendidikan harus mampu membebaskan, dan membuka peluang bagi peserta didik dalam mewujudkan cita-citanya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing secara optimal. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan revolusi mental sebagai jawaban konkret dan operasional terhadap berbagai masalah pendidikan, baik masalah internal maupun eksternal. Lantas apa, siapa, dan bagaimana revolusi mental dalam pendidikan itu?... Benar, bahwa dalam proses pendidikan kita masih diwarnai oleh berbagai kelemahan dan kekurangan, seperti perkelahian pelajar dan mahasiswa, bahkan pelecehan seksual misalnya. Akan tetapi, apakah itu mutlak kesalahan peserta didik?... Apakah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sudah memberikan contoh dan teladan yang baik bagi para peserta didik dan lingkungannya?... Apakah guru-guru sudah dapat digugu dan ditiru oleh peserta didik, dan lingkungannya?... Lebih dari itu; apakah sekolah-sekolah sudah melaksanakan pembelajaran yang efektif bagi perkembangan peserta didik. Apakah pola pendidikan sekolah di republik ini sudah baik dan benar, khususnya yang berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan; serta kepemimpinannya?

Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, pendidikan diharapkan bisa tampil dan berperan dalam membangun serta mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan berwawasan kebangsaan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal, sebenarnya pemerintah sudah memberikan kewenangan yang lebih leluasa dalam pengelolaan pendidikan, meskipun dalam pelaksanaannya masih dilakukan setengah hati. Pemberian kewenangan dan keleluasaan ini, terutama agar orang-orang yang bergerak dalam bidang pendidikan dapat menata secara mandiri eksistensinya dalam memprakarsai perubahan-perubahan yang terjadi dalam tugasnya sebagai

industri jasa, yang harus menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dalam pada itu, kewenangan dan keleluasaan dalam bidang pendidikan, agar orang-orang yang bergerak dalam bidang pendidikan senantiasa berbenah diri melakukan pembaruan manajemennya sesuai dengan perkembangan jaman, perkembangan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri, serta sesuai pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang semakin hari semakin pesat perkembangannya.

Menghadapi permasalahan pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, pendidikan tidak sekedar proaktif berpartisipasi dalam pembangunan jangka pendek, tetapi harus memberikan perhatian yang mendalam terhadap mental, dan etika moral yang luhur. Dalam hal ini, revolusi mental dalam pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila, dan agama yang hidup di negara ini.

Tantangan pendidikan ke depan memang tidak ringan, bahkan bisa dibilang sangat riskan, kompleks, dan semerawut (*chaos*), apalagi dengan kondisi politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti yang kita saksikan sekarang ini, sehingga revolusi mental dalam pendidikan merupakan paradigma baru untuk bangkit dan ke luar dari keterpurukan tersebut. Hal ini penting, karena perubahan kurikulum dan pendekatan pembelajaran tidak akan efektif ketika dimensi kultural yang memengaruhi cara berpikir guru dan peserta didik dalam melakukan pendidikan tidak diubah. Dalam kerangka inilah perlunya “Revolusi Mental dalam pendidikan”; khususnya revolusi mental guru, yang tentu saja harus dibarengi revolusi mental kepala sekolah dan pengawasnya; bahkan peserta didik, dan warga sekolah lainnya; sehingga memiliki pandangan yang jauh ke depan, untuk menggapai kehidupan yang hakiki di masa yang akan datang.

Apa yang diungkapkan di atas menjadi sangat penting, ketika melihat realitas masih banyaknya kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana pendidikan, baik oleh guru, kepala sekolah maupun pengawas. Guru, kepala sekolah, dan pengawas di sekolah merupakan pelaku utama pendidikan dan pembelajaran, sehingga paradigma revolusi mental harus dimulai dan dikembangkan dari para guru, kepala sekolah dan pengawas. Revolusi mental dalam pendidikan diharapkan dapat melahirkan guru emas, kepala sekolah emas, dan pengawas emas yang dapat menghasilkan generasi

emas. Hal ini penting, karena perubahan sebegus apapun tidak akan mengubah budaya pendidikan secara *kaffah*, bila mental guru, mental kepala sekolah, dan mental pengawas di sekolah tidak mampu membangkitkan kesadaran berbasis kreativitas, hanya menciptakan budaya asal bapak senang, serta asal peserta didik lulus dan mendapat ijazah, meski sesungguhnya mereka tidak layak mendapatkannya. Dalam kondisi inilah perlunya revolusi mental di sekolah secara *kaffah*, sehingga terjadi perubahan mendasar dalam sistem dan manajemen pendidikan, yang dimulai dari perubahan mental guru, kepala sekolah dan pengawasnya, serta sistem dan manajemen sekolah secara keseluruhan.

Revolusi mental harus dilakukan sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam setiap matapelajaran, dan dapat dilakukan dalam setiap kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, sampai dengan tahap konfirmasi. Perwujudan revolusi mental di sekolah menuntut guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk memerankan dirinya secara aktif dan kreatif, agar dapat melahirkan ide-ide baru yang fantastik, antara lain melalui berbagai kegiatan sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh kegiatan di sekolah; untuk menanamkan nilai: empati, peduli, dan percaya diri.
2. Menjadi narasumber dan fasilitator dalam menghadapi berbagai permasalahan peserta didik; untuk menanamkan nilai: sabar, peduli, dan santun.
3. Membantu menyelesaikan masalah peserta didik khususnya masalah belajar dengan cara yang efektif dan benar; untuk menanamkan nilai: peduli, dan kebersamaan.
4. Memberikan informasi dan motivasi kepada para peserta didik untuk bereksplorasi lebih jauh dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; untuk menanamkan nilai: semangat dan cinta ilmu.
5. Memberikan acuan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pembelajaran; untuk menanamkan nilai: kritis dan teliti.

Revolusi mental melalui penanaman nilai-nilai Pancasila seperti diilustrasikan di atas, kelak diharapkan dapat menyiapkan peserta didik sebagai lulusan yang bermental baja, bahkan bermental emas, sehingga harapan akan lahirnya generasi emas di tahun 2045, ketika kita merayakan hari ulang

tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ke 100, dapat diwujudkan. Oleh karena itu, revolusi mental perlu ditunjang dan dilandasi oleh kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi (HOT) untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan moral dalam bentuk sikap dan perilaku peserta didik yang positif. Peserta didik dilatih untuk bersikap kritis terhadap isu-isu mental yang terjadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: nilai-nilai apa saja yang dapat dijadikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari?, apa saja kewajiban yang timbul dari hubungan peserta didik dengan lingkungannya?, apa saja konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membelajarkan peserta didik untuk menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial sebagai anggota masyarakat. Hal seperti itu juga merupakan pengkondisian (*conditioning*) nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi berbagai pandangan hidup yang berkembang di masyarakat.

Dalam pada itu, untuk menguatkan kesadaran mental positif, peserta didik perlu dibawa ke dalam pengalaman hidup bersama orang lain dalam situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya, sebagai wujud nyata dari *Contekstual Teaching and Learning (CTL)*. Melalui pengalaman langsung, peserta didik dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, bertindak, berperilaku, dan merespon permasalahan, termasuk menentukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan Pancasila. Dalam hal ini, membantu dan melayani anak yatim dan pakir miskin misalnya, akan memberikan kesan berharga dan kesadaran tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama manusia.

Hal lain yang sangat mendasar dalam mengawal dan mengawali revolusi mental dalam pendidikan adalah keteladanan. Oleh karena itu, tumpuan revolusi mental berada pada guru sebagai pembaharu, guru merupakan kunci dan berada pada titik sentral dari revolusi mental yang harus diarahkan pada perubahan kualitatif. Mengingat peran guru yang sangat strategis dalam revolusi mental dalam pendidikan dan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, maka diperlukan syarat-syarat kepribadian dan kemampuan yang memadai dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik profesional. Dalam Undang-undang guru dan dosen dikemukakan bahwa setiap guru perlu memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial; yang semuanya itu harus menyatu padu

secara utuh dalam pribadi setiap guru, yang akan mewarnai tindakan-tindakan profesionalnya.

Sudah menjadi asumsi bersama bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh guru sebagai pengendali pembelajaran (*who is behind the classroom*). Menyadari hal tersebut, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru melalui berbagai strategi, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi. Namun sayang, survei Bank Dunia menunjukkan bahwa sertifikasi guru ternyata tidak mengubah perilaku dan praktik mengajar guru serta belum meningkatkan prestasi guru dan peserta didik secara signifikan (Kompas, 18 Desember 2012).

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh dan berupaya lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas lagi untuk mendorong dan meningkatkan kinerja guru. Untuk itu, perlu dirancang suatu strategi pengembangan profesionalitas guru yang efektif dan produktif, mulai dari peningkatan pendidikan prajabatan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sampai pengembangan dalam masa jabatan (*on the job training*); termasuk menyekolahkan para guru dengan beasiswa tentunya, untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk kepentingan tersebut, dirasakan perlunya revolusi mental secara utuh dan menyeluruh, sebab permasalahannya bukan hanya terletak pada pendidikan dan kompetensi, tetapi boleh jadi terletak pada lemahnya mental guru, yang harus dikembalikan lagi pada hakikat, harkat dan martabatnya, yakni mental mengabdikan dan mental berbakti kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara.

Hasil survei Bank Dunia, di samping menemukan berbagai hal negatif yang melemahkan program sertifikasi guru, tetapi masih ditemukan adanya dampak positif, antara lain adanya peningkatan minat kaum muda untuk memilih profesi guru. Dampak sementara ini seharusnya dianggap sebagai momentum emas untuk memperbaiki dan meningkatkan profesi guru secara utuh dan menyeluruh. Berbagai hasil analisis yang juga menjadi fokus kajian Bank Dunia, menunjukkan bahwa kultur masyarakat dan kualitas guru merupakan dua faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan, bukan standar nasional, bukan pembiayaan, dan bukan pula kurikulum. Meskipun demikian, transformasi budaya merupakan prakondisi dan sekaligus capaian jangka panjang yang harus ditetapkan dalam pembangunan pendidikan, demikian

halnya keberhasilan implementasi kurikulum dan ujian nasional di sekolah terdapat prasyarat mutlak yang harus dipenuhi, yakni peningkatan kualitas guru agar menjadi guru profesional.

Guru profesional merupakan sebutan untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, dan berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok setiap bulannya. Pemberian sertifikat pendidik kepada guru dilakukan melalui mekanisme dan proses yang cukup panjang, mulai dari penilaian portofolio, uji kompetensi, dan PPLG; bahkan harus mengikuti pendidikan profesi (PPG), yang lamanya kurang lebih satu tahun. Berbagai persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh oleh seorang calon guru tersebut bisa dibilang berat dan sulit. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan calon-calon guru profesional yang bermental emas, bukan sekedar batu loncatan, atau mengisi kekosongan, tetapi betul-betul berniat untuk mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan, yang siap melahirkan generasi-generasi emas di masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan lahir guru-guru profesional yang senantiasa berusaha untuk membangun kinerja baru yang lebih berbobot, bernilai, dan bermakna; seperti guru tanggal satu, yang selalu bersemangat, memberi manfaat, inspirasi dan teladan, serta mengembangkan visi dan inisiatif.

## PENUTUP

Revolusi mental dalam pendidikan perlu dilakukan untuk mengubah pola pikir seluruh masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan; terutama untuk melahirkan generasi emas di satu abad HUTRI diperlukan guru emas, kepala sekolah emas, dan pengawas pendidikan emas. Bagaimana kita bisa melahirkan generasi emas, kalau gurunya perak, bahkan perunggu. Untuk itulah perlunya revolusi mental dalam pendidikan, sehingga para guru dapat menjadi guru emas yang siap melahirkan generasi emas di tahun 2045, dan kita siap bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan negara-negara lain dalam tatanan global internasional.

Kita semuanya sadar, paham, dan tahu tidak mudah melakukan revolusi mental dalam pendidikan, betapa sulit mengubah mental guru, maupun tenaga kependidikan lainnya tetapi harus dilakukan; karena di samping untuk menumbuhkan hubungan yang harmonis antar berbagai pihak di sekolah; yang paling penting untuk memanusiakan manusia, agar kembali pada khitahnya masing-masing. Dalam hal ini; tidak cukup hanya kerja keras, tetapi diperlukan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan

amanah, sehingga menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan, dan perubahan-perubahan kehidupan dan penghidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Revolusi mental dalam bidang pendidikan, perlu diawali dengan mengembalikan peran guru dan sekolah sebagai fasilitator pendidikan dan pembelajaran. Hal ini penting, karena kualitas sekolah sangat bergantung pada kualitas guru dan lingkungannya. Oleh karena itu, revolusi mental dalam pendidikan harus menyentuh persoalan bagaimana membangun manusia yang berkualitas, berwawasan kebangsaan dan berkarakter secara kaffah, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi ajang pengembangan intelektualitas otak kiri saja, tetapi membangun karakter manusianya, jiwa dan qolbunya, yang berada di otak kanan. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi wadah untuk menyiapkan dan menciptakan manusia *kaffah*, yang berintelektual sekaligus berakhlakulkarimah, dan yang paling penting dari semuanya itu, mereka kelak dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Armstrong, Thomas. (2009). *Multiple Intelligences in the Classroom*. 3<sup>rd</sup> ed. California: ASCD.
2. Dewantara. (1967). Ki Hadjar Dewantara. Jogjakarta: Madjelis Leluhur Taman Siswa.
3. Depdiknas. (2005). *Peningkatan Kualitas Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan Dikti.
4. Dyer.et al. (2011). *The Innovator's DNA Maturing The Five Skills of Disruptive Innovator's*. Harvard Bussiness Review Press.
5. Goleman, Daniel (1996). *Emotional Intelegence*. New York, London: Bantam Book.
6. *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *The United Nations Development Program* (UNDP) tahun 2014.
7. Inpres. (2016). *Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)*. Jakarta.
8. Kementrian Pendidikan Nasional. (2010). *Disain Induk Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemdiknas.
9. Koellhoffer, Tara Tomczyk. (2009). *Character Education Being Fair and Honest*. New York: Infobase Publishing.
10. Kompas, 18 Desember 2012. *Revolusi Mental Pasca Reformasi*. Jakarta Kompas.
11. Lickona, Thomas. (2003). *My Thought About Character*. Ithaca and London: Cornell University Press.
12. Mulyasa, H.E. (2011). *Manajemen Pendidikan*

*Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.

13. Mulyasa, H.E. (2015). *Revolusi Mental dalam Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda karya.
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*. Jakarta.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 Tentang *Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Sinar Grafika.
16. Thomas, J. Alan. 1985. *The Productive School: A System Analysis Approach to Educational Administration*. Chichago University.
17. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Jakarta: Sinar Grafika.
18. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang *Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafika.
19. White, John. (1990). *Educational and The Good Life*. London: Educational Studies. Kogan Page.